



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANTONIUS ITOLOHA GAHO
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 947478

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	100.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	155.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, DAIHATSU ALL NEW XENIA 1,3 X CVT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	39.510
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	255.039.510
III. HUTANG	Rp.	171.947.496
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	83.092.014

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAZULI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 949219

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **520.000.000**

1. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. Tanah Seluas 63 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 45.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **112.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF100LD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11C1CA/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ 1.5 M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA H1B02N53L1A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.320.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **633.820.000**

III. HUTANG **Rp.** **25.500.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

608.320.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAILENDRA REZA IRWANSYAH REZEKI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 631117

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
1. MOTOR, HONDA/NC11D1D A/T SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	165.470.327
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	670.470.327

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **670.470.327**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ULLY YUSHARIYEN DAMANIK
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 970602

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU ROCKY 1.2 XCVT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.468.583
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	154.468.583
III. HUTANG	Rp.	127.302.344
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.166.239

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ABIDIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 970715

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	84.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 14DAL15/MIO SOUL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	10.200.000
Sub Total	Rp.	408.200.000
III. HUTANG	Rp.	216.643.745
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	191.556.255

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTHER IRIANTI LOMBOGIA
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 1009261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	650.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 355.000.000		
2. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
3. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
4. Tanah Seluas 517 m2 di KAB / KOTA MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	197.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	951.000.000
III. HUTANG	Rp.	379.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	571.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : VIVI SUSANTI
2. Jabatan : PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000289

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 447.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/300 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 52.500.000

- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
- MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 138.430.824

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 637.930.824

III. HUTANG Rp. 370.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 267.930.824

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOVELYSA EH. SAMOSIR
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 949577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	121.000.000
1. MOBIL, TERIOS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 55S (T135 SEC) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.854.973
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.035.854.973
III. HUTANG	Rp.	305.760.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	730.094.973

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.